

DINAMIKA KEHIDUPAN PRIYAYI JAWA ABAD 19-20 DALAM NOVEL TETROLOGI PULAU BURU KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER : SEBUAH STUDI KOMPARASI REALITAS HISTORIS

SINUNG WAHYUDI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : sinungwahyudi2014@gmail.com

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kehidupan priyayi merupakan suatu bentuk dinamika kehidupan yang merupakan bagian dari potret kehidupan masyarakat Jawa disekitar abad 19-20. Penelitian ini membahas mengenai komparasi kehidupan priyayi jawadalam novel Tetralogi Pulau Buru karya pengarang ternama Pramoedya Ananta Toer dengan realitas sejarah yang berlaku menurut zamannya. Latar waktu pada penelitian ini adalah pada abad 19-20. Latar masalah yang mejadi fokus penelitian adalah bagaimana kondisi masyarakat Jawa menjelang akhir abad 19, bagaimanakah bentuk dari unsur-unsur kehidupan priyayi yang terdapat dalam novel Tetralogi Pulau Buru, bagaimanakah relevansi antara unsur-unsur tersebut dalam kaitannya dengan realitas sejarah yang berlaku. Untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Jawa menjelang akhir abad 19 Untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk dari unsur-unsur kepriyayian Jawa yang terdapat dalam novel Trilogi Bumi Manusia. Untuk dapat mengetahui bagaimana unsur-unsur budaya kepriyayian Jawa yang terdapat dalam novel Tetralogi Pulau Buru dalam korelasinya dengan realitas sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah Louis Gotschalk yang terdiri atas heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori wacana Norman Fairclough . Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan kecocokan yang akurat antara unsur-unsur kepriyayian dalam novel Tetralogi Pulau Buru dengan fakta sejarah yang berlaku. Kecocokan tersebut dapat ditelusuri dari Koran Medan Prijaji.

Kata Kunci : Priyayi Jawa, Tetralogi Pulau Buru, Medan Prijaji

Abstract

The priyayi is a form of the dynamic of that is part of a portrait of public life around 19-20 java century. This research discusses comparison of priyayi java life in a tetralogi island rush novel of famous writer pramoedya toer with reality of history act in his days. A time on research is in the 19-20. A problems that our main focus research is how condition of a community java before the end of the 19, how form of priyayi life contained in a novel tetralogi island rush, how relevance of the priyayi in relation to reality prevailing history. To be able to know how the form of of elements java priyayi there are in a novel tetralogi the earth man. To be able to know how elements java priyayi there are in a novel tetralogi rush island in correlation with reality history. Methods used in research this is the method of historical research louis gotschalk consisting of a heuristic, criticism, interpretation and historiografi. Fundamental principle of the theory used in this research s a theory discourse norman fairclough. The result of this research was found match accurate between elements kepriyayian in a novel tetralogi island boy with the historical fact that applies. The match can be traced of a newspaper medan prijaji.

Keyword: priyayi java, tetralogi island boy, medan prijaji

PENDAHULUAN

Dalam kebudayaan Hindu-Buddha masyarakat dibedakan dalam kelas sosial tertentu yang di sebut kasta. Kasta Brahmana menjadi pemuncak kelas yang terdiri dari para pendeta. Ksatria berada di bawahnya dengan di dalamnya adalah para raja dan perangkatnya. Kasta berikutnya adalah Waisya yang terdiri atas para pedagang . Yang terakhir adalah kasta Sudra yang terdiri atas petani. Priyayi terlahir dari akar budaya sistem kasta tersebut. Pada era ini mereka yang

disebut priyayi adalah mereka yang bisa menelusuri balik asal-usulnya sampai kepada raja-raja besar. Istilah priyayi sendiri berakar dari kata para-yayi yang artinya adalah adik laki-laki dan adik perempuan raja. Priyayi mempunyai peran yang sangat vital dalam sistem kebudayaan masyarakat Indonesia. Mereka dianggap sebagai golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki darah keturunan dari keluarga keraton.

Priyayi menempati kedudukan antara raja dan putra-putra mahkota dan seluruh masyarakat. Hidup berada di tengah-tengah seperti jembatan antara raja dan masyarakat membuat kehidupan priyayi sangat kompleks dan dinamis. Sebagai kerabat kerajaan tugas mereka adalah sebagai pengumpul upeti, pengorganisasi kerja bakti, pemobilisasi rakyat ketika terjadi perang.¹ Pengertian dan fungsi priyayi sedikit beralih makna ketika Indonesia dikuasai oleh kolonial Belanda. Belanda mempekerjakan kaum priyayi sebagai instrument administratif dari kebijakan mereka. Sebagaimana pada masa kerajaan, kehidupan priyayi pada masa Kolonial ini pun sama kompleksnya karena menjadi jembatan antara rakyat biasa dengan pemerintah Kolonial Belanda. Sebagaimana pada masa kerajaan, kehidupan priyayi pada masa Kolonial ini pun sama kompleksnya karena menjadi jembatan antara rakyat biasa dengan pemerintah Kolonial Belanda. Jika di lihat dari kronologis zamannya, priyayi dibedakan menjadi tiga zaman yaitu zaman tradisi, zaman transisi, dan zaman modern. Zaman Tradisi adalah zaman dimana kehidupan para priyayi masih sangat terorientasi pada raja dan istana dan kebanyakan dari mereka masih berpola pikir irasional. Zaman transisi adalah zaman peralihan antara zaman tradisi yang berorientasi pada kerajaan menuju zaman pemerintah Kolonial Belanda. Zaman modern adalah zaman pasca kemerdekaan. Novel secara teknis memang bukan karya sejarah melainkan produk dari ilmu bahasa. Antara sejarah dan sastra sangat berlainan satu dengan yang lain. Sejarah identik dengan fakta dan sastra identik dengan imajinasi. Namun mengutip dari yang di katakana oleh Kenney bahwa sastra dalam hal ini adalah novel merupakan suatu fiksi naratif yang panjang dan merupakan imitasi dari keadaan sebenarnya. Novel juga dikatakan sebagai genre yang paling sosiologis dan responsif sebab sangat peka terhadap fluktuasi sosiohistoris. Pengarang banyak memanfaatkan realita sejarah sebagai bahan tulisan dalam karya sastranya untuk kemudian menginterpretasi, menerjemahkan peristiwa itu, dan untuk memahami peristiwa tersebut dalam subjektivitas dirinya.² Namun demikian sejarah tetap berbeda dengan sastra. Sejarah adalah kenyataan faktual dan sastra adalah fiksi

Alasan peneliti untuk menjadikan Novel Tetralogi Pulau Buru sebagai objek penelitian adalah karena novel ini merupakan novel sejarah yang sangat kompleks. Mengutip dari kata-kata kuntowijoyo yang mengatakan bahwa Novel sejarah yang sesungguhnya barangkali ialah karya-karya pulau buru Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa yang terlarang itu. Dalam novel-novel itu di gambarkan sebuah kurun sejarah, hubungan antar

manusianya, dan perubahan sosial pada peralihan abad ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sastra berbeda dengan sejarah. Begitupun dengan objek penelitian ini, meskipun novel Tetralogi Pulau Buru ini termasuk dalam novel sejarah yang menyelipkan fakta-fakta empiris, tetap saja unsur-unsur fiktif dalam novel ini tetap ada. Maka dari itu dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dibuatlah penelitian tentang kehidupan priyayi Jawa abad 19-20 yang menjadikan novel Tetralogi Pulau Buru sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini akan mencoba memilah unsur-unsur mengenai kehidupan priyayi Jawa dalam novel Tetralogi Pulau Buru tersebut untuk kemudian mengkomparasikannya dengan realitas sejarah yang yang memang berlaku pada masa tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah Louis Gotschalk yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Adapun penjelasan mengenai metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Heuristik merupakan suatu proses mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang di anggap relevan dan diperlukan.³ Sumber-sumber terkait yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa novel, buku, jurnal dan koran. Sumber utama yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa novel Tetralogi Pulau Buru karangan Pramoedya Ananta Toer yang terdiri atas Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah kaca. Untuk novel Bumi Manusia peneliti menggunakan terbitan bulan jauari 1981 yang merupakan cetakan novel yang kelima. Empat edisi sebelumnya dicetak berturut-turut pada bulan Agustus, September, Oktober, November tahun 1980. Novel Bumi Manusia yang dipakai oleh peneliti merupakan terbitan dari Hasta Mitra dari Jakarta. Untuk novel Anak Semua Bangsa peneliti menggunakan terbitan bulan Februari 1981 yang merupakan cetakan ketiga. Dua edisi sebelumnya terbit pada bulan Desember 1980 dan bulan Januari 1981. Sama dengan Bumi Manusia, edisi ini diterbitkan oleh Hasta Mitra. Untuk novel Jejak Langkah peneliti menggunakan edisi pertama peluncuran yang di cetak pada tahun 1985. Novel Rumah Kaca peneliti menggunakan edisi pertama yang dicetak pada tahun 1988. Kedua novel ini juga diterbitkan oleh penerbit Hasta Mitra dari Jakarta. Keempat novel ini diperoleh dari Perpustakaan Medayu Agung yang beralamat di jalan Medayu Selatan Gang IV, No. 42-44, Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya.

Perpustakaan Medayu Agung adalah perpustakaan pribadi milik Oei him hwie atau yang

¹ Ong Hok Ham, *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 10.

² Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT. Tiata Kencana, 1999), hlm. 39.

³ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2011), hlm. 10.

biasa dipanggil Pak wie. Pak wie dulunya merupakan seorang wartawan dari Koran Trompet Masyarakat yang ditangkap saat meletusnya peristiwa tahun 1965 dan diasingkan di pulau Buru yang kemudian disana bertemu dengan Pramoedya Ananta Toer. Perpustakaan ini memuat foto, majalah, koran, klipng dan juga buku. Untuk buku, perpustakaan Medayu Agung terdiri atas 2 macam koleksi buku yaitu koleksi langka dan koleksi khusus. Koleksi langka terdiri dari buku-buku kuno berbahasa Belanda, melayu, Inggris dan Jerman. Koleksi khusus terdiri dari buku mengenai Bung Karno, etnis tionghoa dan juga karya-karya dari Pramoedya Ananta Toer. Untuk sumber arsip, peneliti menggunakan koran masa lampau yang relevan untuk bisa menguatkan adanya keterkaitan antara hipotesa yang diambil melalui novel dengan realitas sejarah yang terjadi pada masa itu. Untuk sumber yang berkaitan dengan buku, penelusuran dilakukan di beberapa tempat seperti Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung.

Kritik sumber merupakan tahap dimana sumber-sumber sejarah akan di teliti sejauh mana originalitas, otentisitas dan keabsahannya. Kritik sumber sangat di perlukan karena bisa menentukan kebenaran peristiwa yang dikaji benar-benar asli atau tidak. Peneliti dalam kaitannya dengan objek penelitian akan mengkroscek sumber data yang menjadi acuan perbandingan agar sesuai pada konteks peristiwa dan zamannya. Tujuan dari adanya kritik sumber adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta.⁴

Interpretasi adalah menguraikan dan menyatukan fakta-fakta sejarah dan kemudian menafsirkannya.⁵ Hal ini dilakukan agar fakta-fakta yang tampaknya terlepas antara satu sama lain bisa menjadi satu hubungan yang saling berkaitan. Dengan demikian interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai fakta. Interpretasi itu dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna menyikap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Pada tahap ini subjektifitas penulis dapat terjadi. Subjektifitas inilah yang kemudian bisa melahirkan perbedaan interpretasi antara satu penulis dengan penulis lain. Meskipun sumber data dan peristiwa sejarah yang digunakan sama, namun karena adanya perbedaan sudut pandang dan cara pandang yang dipakai satu dengan yang lain, output yang dihasilkanpun pasti akan berbeda. Hal ini tentu didasari oleh latar belakang, budaya, dan kepentingan yang mungkin berbeda. Dalam melakukan penafsiran, seorang peneliti dituntut untuk bisa memiliki ketrampilan dalam membaca dan memahami isi sumber. Ketrampilan dalam memahami bahasa sangat dikedepankan karena pemahaman struktur kata dan struktur kalimat akan mempengaruhi kualitas dari

hasil penelitian. Tafsiran yang dilakukan dalam penelitian ini tentu saja berdasar pada fakta-fakta terkait yang telah di temukan. Fakta-fakta seperti pendidikan priayi, kehidupan priyayi, kedudukan priyayi, hubungan priyayi dengan masyarakat di sekitarnya, fungsi dan peran priyayi yang semuanya diperoleh dari sumber terkait akan di kombinasikan dan dikomparasikan dengan novel Tetralogi Pulau Buru untuk menjadi satu kesatuan yang utuh.

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Tahap akhir dalam metode penelitian sejarah menurut Louis gottschalk adalah Historiografi. Historiografi juga bisa diartikan sebagai output dari proses panjang yang telah dijelaskan di atas. Adanya tiga proses diatas dimaksudkan agar suatu karya penelitian sejarah mempunyai kualitas yang baik dan bermutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA ABAD 19

1. Tanam Paksa Dan Politik Etis

Kolonialisasi yang dilakukan oleh Negara-negara asing atas Hindia Belanda mengakibatkan kemunduran dalam berbagai segi kehidupan seperti dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial.⁶ Akibat dari kolonialisasi tersebut, masyarakat Indonesia berada dalam lingkaran kebodohan dan kemelaratan yang sangat tinggi. Sifat otoriter yang di terapkan penjajah Kolonial memposisikan masyarakat Indonesia selalu terkungkung dalam kemunduran dan keterbelakangan. Pada awal mula pergantian abad 18, pemerintahan Hindia-Belanda tidak lagi berada di tangan VOC lagi melainkan berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Adanya kebangkrutan dalam tubuh VOC membuat organisasi tersebut di bubarkan oleh pemerintah Belanda. Kerajaan Belanda membutuhkan anggaran untuk menutupi kekosongan kas kerajaan yang habis akibat membiayai perang Diponegoro. Usulan kemudian datang dari Van den Bosch yang dikemudian hari menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda yang ke-43, bahwa untuk mengisi kas negara yang kosong dapat dilakukan dengan pemberlakuan kebijakan tanam paksa dengan menanam tanaman ekspor secara besar-besaran yang laku di pasar Eropa. Tanam Paksa sendiri ialah suatu sistem dimana penduduk harus menyerahkan sejumlah hasil bumi sebagai ganti membayar pajak tanah yang mereka tanam. Tanaman-tanaman yang wajib ditanam antara lain adalah cengkeh, kopi, lada serta tembakau. Isi dari sistem tanam paksa adalah rakyat wajib menyediakan seperlima lahan garapannya untuk ditanami tanaman ekspor, lahan yang disediakan

⁴ *Ibid.*, hlm. 11

⁵ *Ibid.*, hlm. 70

⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1979), hlm. 343.

untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.⁷

Dalam teorinya, kedua belah pihak baik itu pemerintah kolonial maupun rakyat pribumi akan mendapatkan keuntungan dari sistem Cultuurstelsel ini. Tanah luas yang berada didesa-desa akan ditanami tanaman yang selain bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan logistik pribadi dari penduduk, juga bisa digunakan untuk meningkatkan penghasilan para petani dengan cara menjual hasil buminya ke pemerintah kolonial. Sebagai *feedback*, pemerintah Belanda mendapatkan harga komoditi tanaman dengan harga yang relatif murah karena mendapat langsung dari sumbernya. Namun demikian antara teori dan fakta jauh berbeda, kenyataannya dengan adanya Tanam Paksa ini membuat tekanan fisik dan mental yang sangat hebat bagi rakyat, kemiskinan semakin meluas, tingkat kematian meningkatkan secara drastis karena kelaparan dan wabah penyakit. Namun demikian dari segudang penderitaan yang di rasakan oleh rakyat, ada juga golongan-golongan diluar pemerintah kolonial Belanda yang bisa mencicipi keuntungan dengan adanya tanam paksa itu.

2. Sistem Feodalisme Masyarakat Jawa

Feodalisme ialah sistem sosial atau politik yang menyangkut pemberian kekuasaan serta hak istimewa yang besar untuk golongan bangsawan. Sistem sosial tersebut sangat mengangungkan jabatan atau kedudukan sosial yang tinggi dan tak peduli dengan potensi yang dimiliki oleh manusia. Feodalisme memiliki dua arti, pertama, sebuah sistem sosial yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, sedangkan yang kedua adalah sistem sosial yang mengagung-angungkan jabatan atau pangkat dan bukan prestasi kerja. Feodalisme Jawa dibangun atas kekuasaan penguasa, didasarkan atas jumlah pengikut dan diikat oleh konsep bersatunya kawula dan gusti atau bawahan dan atasan. Sistem feodal di Jawa dilandasi oleh kebudayaan Jawa kuno yang dipengaruhi oleh agama Hindu.

Di Jawa sistem feodal bersifat total berdasarkan masyarakat pertanian, ketergantungan dan *patriomonalistik*, artinya, kaum feodal merupakan tokoh panutan yang harus disegani, sedangkan rakyat harus hidup menghamba dan selalu dalam posisi dirugikan. Sistem sosial atau politik dalam pengertian era feodal memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Dasar stratifikasi dari era feodalisme ini adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan dan pendidikan. Masyarakat biasa hanya dianggap sebagai kawula dan tidak mempunyai hak untuk ambil bagian dalam urusan pemerintahan. Peran utama yang mereka jalankan adalah melayani gusti mereka yaitu pada kaum priyayi mereka. Hubungan antara priyayi dan masyarakat biasa bersifat otoriter dan paternalistik.⁸ Bakti terbesar dari rakyat adalah

melayani majikannya seumur hidup. Keluarga raja dan priyayi dianggap setengah dewa dan perintah mereka dianggap sebagai sabda. Secara ekonomi rakyat biasa adalah pembayar pajak yang setia. Secara sosial mereka merupakan warga yang berdedikasi, patuh pada peraturan yang dikeluarkan atas nama raja dan pemerintah kolonial.⁹ Rakyat memiliki kewajiban yang penuh untuk melaksanakan berbagai perintah raja. Para pegawai kerajaan diberi oleh raja sebidang tanah garapan. Tanah garapan tersebut disebut *lungguh* atau *tanah apanage*. Pada tanah *lungguh* terdapat sekelompok petani yang menjadi penggarapnya. Para petani penggarap tanah *lungguh* terdiri dari sikep dan bujang atau numpang. Sikep adalah petani yang menguasai tanah garapan dan mempunyai kewajiban untuk menyetorkan pajak atau upeti dari hasil tanah garapannya kepada priyayi. Tanah ini sewaktu-waktu dapat diambil kembali karena pemegangnya meninggal atau dianggap tidak loyal kepada raja. Tanah yang dikembalikan kepada raja disebut siti gantungan. Tanah ini nantinya digunakan sebagai tanah persediaan kepada birokrat lain sebagai *lungguh* dan bagi pegawai yang sudah purna karya mendapat tanah pengaremarem. Seberapa besar tanah yang diberikan raja kepada seorang priyayi tergantung dari seberapa besar hubungan trah kepriyayian yang ia miliki dan juga berdasar dari segi kemampuan maupun kecakapan. Disamping itu, dalam hal-hal khusus, raja menghadiahkan tanah kepada sekelompok warga masyarakat tertentu dengan tugas-tugas tertentu.

Meskipun dalam setiap daerah terdapat seorang penguasa yang berasal dari keturunan raja, namun penguasa-penguasa tersebut harus tetap tunduk dan menjalankan perintah raja di keraton. Dan orang-orang berkedudukan lebih rendah tidak berhak menilai norma moral orang-orang yang berkedudukan tinggi, apalagi mengkritik atau meminta pertanggung jawaban mereka. Maka atasan dengan sendirinya dianggap benar, tidak pernah salah dan dengan demikian menjadi standar moral yang akan ditiru oleh bawahannya. Yang paling berkuasalah yang mengatur segalanya dari segi politik. Dia yang mempunyai lahan yang luas dan mempunyai harta kekayaan yang banyak dialah yang berkuasa. Tetapi ada juga yang secara turun-temurun berkuasa karena atas dasar banyak pengikutnya dan dipercaya oleh para pengikutnya, sedangkan para abdi dalem itu hanya orang-orang yang setia pada raja atas dasar loyalitas dan sudah melayani dan berbakti pada raja dengan jangka waktu yang lama. Selain yang berada di sekitar keraton ada juga priyayi yang berada di tingkat desa yang salah satunya seperti seorang *Modin*. Tugas utamanya adalah memimpin acara-acara yang berkenaan dengan keagamaan. Mereka tidak dibayar, tetapi mendapatkan hak mengusahakan sebagian tanah desa sebagai pengganti gaji yang disebut dengan

⁷ Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15

⁹ *Ibid.*, hlm. 15

bengkok atau palungguh. Mereka biasanya saling bertemu secara teratur setiap *selapan*¹⁰ hari sekali.

Para petani dan wong cilik adalah bagian dari stratifikasi sosial yang sebenarnya sangat berperan penting dalam struktur feodal, seperti rakyat. Dalam era yang sekarang pun unsur rakyat sangat penting dalam sebuah negara. Tanpa adanya rakyat, maka tidak bisa disebut negara, begitu pula dengan struktur feodalisme semakin sedikit rakyat maka kerajaannya pun semakin lemah, karena pada masa feodalisme ini sektor pertanian sangatlah penting dan pertanian tidak akan berjalan tanpa adanya petani yang banyak pula mengingat semakin besar hasil produksinya maka kerajaan itu akan semakin maju. Dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan sehari-hari, para golongan atas ini akan menempatkan diri dalam posisi stratifikasi sosial, hirarki feodal dan sistem komunikasi hirarkis yang sama. Kekuasaan mereka ditopang oleh para bawahannya. Sistem ini kemudian berkembang luas. Bangsawan menjadi kelompok yang sangat istimewa dan melakukan regenerasi berdasarkan keturunan. Sisi negatif yang sering dituduhkan terhadap paham ini adalah bahwa Jawaisme atau sikap feodal orang Jawa ini membentuk mental bangsa Indonesia menjadi mental kacung. Sikap ini dianggap sebagai penyumbang terbesar terhadap terpuruknya bangsa ini, yang mengakibatkan kolonialisme dan imperialisme dapat bertahan di negara ini sampai berabad-abad lamanya.

Bagi orang Jawa kuno, pusat di dunia ada pada raja dan keraton atau istana. Tuhan adalah pusat makrokosmos sedangkan raja adalah perwujudan tuhan di dunia, sehingga dalam dirinya terdapat keseimbangan berbagai kekuatan alam, jadi raja adalah pusat komunitas di dunia seperti halnya raja menjadi makrokosmos dari tuhan dengan keraton sebagai kediaman raja. Keraton merupakan pusat keramat kerajaan dan bersemayamnya raja karena raja merupakan sumber kekuatan-kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketentraman, keadilan dan kesuburan.

3. Budaya Patriarki

Budaya Patriarki adalah sebuah budaya manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat atau superior dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Menurut Rokhmansyah patriarki berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segalanya. Perwujudan budaya patriarki ini pada perempuan misalnya adalah marginalisasi, diskriminasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban kerja.¹¹ Budaya patriarki menempatkan perempuan sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsi dalam sektor domestik, sebagai istri atau ibu, mengurus rumah

tangga, mengasuh anak, dan melayani suami. Pola pikir dalam budaya patriarki adalah bahwa laki-laki itu kuat, rasional, jantan, dan perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, emosional dan keibuan.¹² Kemunculan sistem patriarki menjadikan perempuan sebagai makhluk pengabdian saja. Perempuan menjadi budak dari keserakahan laki-laki, dan menjadi mesin pembuat anak belaka.

Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender. Hal itu kemudian diteruskan serta menjadi sebuah tradisi dan keyakinan yang dilaksanakan dalam kehidupan. Pelaksanaan tradisi tersebut menurut masyarakat Jawa digunakan untuk keteraturan masyarakat Jawa.

Pada masyarakat Jawa, laki-laki dianggap memiliki hak yang lebih tinggi sebab mempunyai kewajiban dalam menentukan keputusan. Fisik yang kuat dan maskulin membuat laki-laki menang dalam pembagian kerja. Laki-laki menjalankan fungsi-fungsi sektor publik. Laki-laki memiliki kewajiban dalam memberi nafkah secara ekonomi kepada keluarganya untuk kelangsungan kehidupan. Laki-laki menjalankan peran untuk menghasilkan uang. Perempuan yang mempunyai fisik lemah lembut dianggap lemah dalam mengambil keputusan. Ia bahkan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal apapun, termasuk dalam hal yang menyangkut dirinya sendiri misalnya yang berkaitan dengan alat-alat reproduksinya sekalipun, seperti melayani atau tidak melayani keinginan seksual suaminya, menentukan ingin atau tidak ingin hamil karena kekurangsiapan fisik, mental dan ekonomi, dan sebagainya¹³. Perempuan menerima nafkah dari suami membuat perempuan menjadi pihak penerima dan menjadi posisi kedua. Selain itu, marginalisasi perempuan dalam sistem patriarki diperparah dengan anggapan bahwa segala hal yang dilakukan perempuan dalam ranah domestik bukanlah sesuatu yang perlu dihargai dan diperhitungkan. Hal ini disampaikan oleh Setiawan bahwa perempuan yang siang-malam tidak pernah berhenti bekerja, tidak dianggap bekerja oleh kaum laki-laki dan bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Karena bekerja baru dikatakan bekerja ketika menyangkut proses produksi dan menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Pembatasan-pembatasan peran perempuan dalam budaya patriarki menempatkan perempuan dalam keterbelengguan dan seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif. Menurut Millet, institusi dasar dalam pembentukan budaya patriarki adalah keluarga yang mana ideologi patriarki terpelihara dengan baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Sebagai unit terkecil dari patriarki, keluarga

¹⁰ 35 hari dalam sistem hitungan masyarakat Jawa

¹¹ Mansour Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 8.

¹² *Ibid.*, hlm. 8

memberikan kontribusi besar dalam penguatan ideologi ini. Selain itu, keluarga yang menganut sistem patriarki memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki daripada perempuan. Biasanya orang tua lebih mementingkan anak laki-lakinya untuk sekolah yang tinggi sedangkan anak perempuannya diminta di rumah .

Keluarga mendorong setiap anggotanya untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat yang menganut patriarki. Masyarakat Jawa menganggap memiliki anak banyak adalah hal yang baik serta menaikkan gengsi bagi keluarga tersebut. Adanya filosofi tersebut membuat membuat istri mengemban tanggung jawab yang besar dalam membesarkan anak-anaknya. Namun setelah dewasa, terlebih jika anak laki-laki maka pada akhirnya semua rasa hormat ditujukan kepada ayahnya bukan pada ibu yang membesarkannya. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan penggunaan bahasa Jawa kromo yang hanya ditujukan untuk ayah saja sementara ibu tidak.¹³ Hal itu membuat perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Menurut Millet, ideologi patriarki disosialisasikan ke dalam tiga kategori Pertama adalah temperament yang merupakan komponen psikologi yang meliputi pengelompokan kepribadian seseorang berdasar pada kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang dominan. Hal itu memberikan kategori stereotype kepada laki-laki dan perempuan seperti kuat, cerdas, agresif, efektif merupakan sifat yang melekat pada laki-laki, sedangkan tunduk/submissive, bodoh/ignorant, baik/virtuous, dan tidak efektif merupakan sifat yang melekat pada perempuan. Kedua, sex role yang merupakan komponen sosiologis yang mengelaborasi tingkah laku kedua jenis kelamin. Ketiga, status yang merupakan komponen politis dimana laki-laki memiliki status superior di depan publik

Perempuan Jawa digambarkan tidak memiliki peran dan kehidupannya seolah-olah tergantung pada laki-laki. Swarga nunut neraka katut menjadi ungkapan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga dalam konteks hubungan dengan suami. Dalam pengambilan keputusan tentang anak dalam kaitannya dengan persoalan jodoh dalam keluarga priyayi, pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan ayah, sementara seorang ibu dan anak perempuan tidak berhak bicara seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perempuan ditempatkan hanya ke dalam urusan-urusan reproduksi seperti menjaga rumah dan mengasuh anak.

Kaum perempuan yang masuk ke dalam dunia kepriyayian baik sebagai seorang istri maupun anak dari kaum priyayi dituntut untuk memiliki kehidupan yang ideal menurut barometer adat Jawa. Anak perempuan dari kaum priyayi mempunyai area teritori pergaulan yang sangat terbatas. Karena batas tersebut

membuat interaksi sosial anak kaum priyayi sangatlah terbatas. Teman yang mereka miliki juga sangat sedikit karena batas terjauh dari lingkup bermain yang diperbolehkan hanya sebatas di pekarangan. Perempuan Jawa memiliki banyak pembatasan yang harus dilakukan dalam segi tatakrama kesehariannya. Anggapan bahwa perempuan harus menjadi seorang yang penurut, setia, serta lembut telah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa. Dalam budaya patriarki, perempuan menjadi seorang pribadi yang selalu patuh dan tunduk pada kekuasaan laki-laki. Penindasan tersebut berawal dari adanya adat yang turun-temurun dalam masyarakat yaitu perempuan dikenal dengan istilah kanca wingking dalam budaya Jawa. Istilah tersebut berarti menunjukkan posisi sebagai istri yang tempatnya dibelakang tidak sejajar dengan suaminya di depan. Istilah kanca wingking dalam budaya Jawa menggambarkan bahwa perempuan diidentikkan dengan bagian domestik saja yaitu seputar dapur, sumur, dan kasur. Pemberian pandangan tersebut mengakibatkan perempuan khususnya yang sudah menikah memiliki ruang gerak yang sangat sempit sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengenal dunia luar. Budaya patriarki dikaitkan juga dengan masalah gender. Gender bisa diartikan sebagai atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan secara sosial maupun kultural. Namun anehnya dalam budaya patriarki masalah gender dianggap sebagai hal yang wajar, karena perbedaan gender dianggap sebagai buah dari pemberian yang maha kuasa. Yang menjadi fokus utama sebenarnya adalah perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan, namun nyatanya yang terjadi adalah lain, seringkali gender malah melahirkan ketidakadilan.

B. KEHIDUPAN PRIYAYI JAWA PADA AKHIR ABAD 19-20 AWAL

1. Identitas Priyayi Jawa

Menurut Clifford Geertz priyayi adalah orang yang bisa menelusuri asal-usul keturunannya sampai kepada kaum raja-raja besar Jawa pada zaman sebelum penjajahan atau sejak Belanda memerintah Jawa lebih dari tiga ratus tahun yang kemudian dipekerjakan sebagai instrumen administrasi kekuasaannya. Ong Hok Ham mengatakan bahwa priyayi merupakan penguasa-penguasa setempat yang tugasnya menghubungkan antara raja yang berada di kerajaan dan rakyat yang berada di daerah atau di desa. Berbeda dengan kedua tokoh diatas Hether Sutherland mengemukakan bahwa priyayi merupakan suatu kelompok masyarakat yang menempati jabatan-jabatan di bidang administrasi pemerintahan yang berada di lingkup dalam negeri. Savithri Scherer mengutarakan bahwa priyayi adalah para pegawai pemerintahan Belanda. Di dalam kenyataan hidup

¹³ Hildred Greetz, *Keluarga Jawa*, (Jakarta: Grafiti Press, 1983), hlm. 155.

masyarakat orang Jawa, orang masih membedakan antara orang priyayi yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar dengan orang kebanyakan yang disebut *wong cilik*, seperti petani-petani, tukang-tukang, dan pekerja kasar lainnya, disamping keluarga keraton dan keturunan bangsawan atau bendara-bendara .

Priyayi merupakan suatu kelompok sosial tertentu yang berada di atas golongan rakyat yang tugasnya adalah memberi pengaruh, memimpin, menuntun dan mengatur masyarakat yang hidup di era tahun 1900-an dan termasuk dalam golongan elit, pendapat tersebut dikemukakan oleh Van Niels. Pendapat lain mengemukakan bahwa priyayi adalah golongan masyarakat menengah atas pada jaman kolonial Belanda. Mereka pada umumnya adalah keturunan keluarga bangsawan Jawa yang termasuk dalam kerabat keraton Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, dan Kesultanan Cirebon di pesisir barat.¹⁴ Pengaturan pemerintah Belanda tentang kedudukan pangreh praja telah dirumuskan dalam pasal 67 bahwa Sejauh keadaan mengizinkan, penduduk pribumi hendaklah dibiarkan berada di bawah pengawasan pemimpin-pemimpin mereka sendiri, baik yang diangkat maupun yang diakui oleh pemerintah, tunduk kepada semacam supervise yang lebih tinggi yang akan ditetapkan dengan peraturan atau khusus dari gubernur jenderal.

Perkataan priyayi berasal dari asal kata parayayi, atau bisa diartikan sebagai para saudara sang raja. Walaupun penggunaan kata “saudara” semula barangkali dimaksudkan sebagai pertalian darah dengan raja atau bupati, setelah bertahun-tahun istilah ini kehilangan konotasinya. Dengan nuansanya yang sedikit berbeda-beda menurut daerah masing-masing. Istilah ini pada umumnya diartikan untuk menyebut para pejabat pemerintahan pribumi yang berkedudukan rendah atau berumur lebih muda ketimbang raja atau bupati. Golongan priyayi pada akhirnya digunakan sebagai penyebutan kolektif terhadap elite Jawa yang termasuk di dalamnya adalah bupati.¹⁵ Dalam kebudayaan Jawa istilah priyayi atau berdarah biru merupakan kelas sosial yang mengacu kepada golongan bangsawan dan menempati kedudukan antara raja dan putra-putra mahkota dan seluruh masyarakat lainnya. Keturunan ningrat dianggap pusat dalam diri penguasa, asal dapat mendekatinya, berarti orang yang dekat tersebut ikut berkuasa. Lebih lagi orang Jawa cenderung menganut struktur kekerabatan melalui garis vertikal. Perlu diketahui bahwa gelar kepriyayian sangat dihormati pada waktu itu. Priyayi bertugas mengumpulkan

upeti, mengorganisasi kerja bakti, memobilisasi rakyat dalam peperangan, dan lain-lain.¹⁶

2. Keluarga Priyayi

Dalam keluarga priyayi, memiliki anak banyak menandakan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga berada dan oleh karena itu mempunyai anak merupakan lambang gengsi. Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Koentjaraningrat bahwa orang Jawa senang mempunyai anak banyak karena hal itu menaikkan gengsinya. Hubungan antara anak dan gengsi ini terutama ada dalam keluarga priyayi dan juga dalam bangsawan Jawa.¹⁷ Pada zaman sebelum perang, seorang pegawai pangreh praja yang masih muda yang berada di bawah usia 30 tahun biasanya memang sudah mempunyai dua atau tiga anak, sedangkan seorang pegawai senior biasanya mempunyai tujuh orang anak lebih.¹⁸

Dalam tradisi kepriyayian zaman dahulu, pada waktu kandungan berumur tujuh bulan diadakan suatu upacara yang disebut Mitoni. Upacara ini merupakan suatu wujud syukur untuk menghadapi kelahiran yang biasanya seluruh keluarga seperti bibi, paman dan saudara-saudara sepupu datang untuk ikut dalam upacara tersebut. Kemudian setelah melahirkan akan diadakan lagi slametan beserta sebuah upacara penguburan ari-ari dari bayi yang telah lahir. Pemberian nama pada seorang bayi biasanya dilakukan tujuh hari setelah bayi tersebut lahir. Dalam keluarga priyayi akan kita jumpai nama-nama yang di ambil dari cerita-cerita wayang atau dari kesusastraan Jawa untuk anak mereka seperti seperti, Sukarno, Suroto, Suhadi, Sriyati, Lestari, atau Kartini.¹⁹ Juga oleh karena kejadian-kejadian penting di dalam maupun diluar negeri, seringkali merupakan sumber ilham bagi mereka untuk menanamkan anak-anak mereka, seperti misalnya merdekawati bagi seorang bayi wanita yang lahir pada tanggal 17 agustus, atau Irianto bagi bayi pria yang lahir sekitar saat kembalinya irian jaya kepada Indonesia. Adapula orang-orang yang menciptakan nama-nama sendiri dengan cara mengambil dari kata-kata Jawa yang indah, tetapi yang dalam kombinasinya tidak kedengaran terlalu bersifat Jawa, melainkan lebih nasional Indonesia misalnya Rini Sawitri, Mitra Kartika dan sebagainya. Anak-anak priyayi tinggi biasanya menggunakan Joko- atau Bambang- di depan nama mereka, sedangkan anak-anak perempuannya memakai Endang. Misalnya, Joko sentono Atau Bambang Suwarno, untuk anak perempuan misalnya, Endang Suwarni.²⁰

Di zaman sebelum perang dunia ke-2 biasanya keluarga priyayi mempunyai pengasuh anak atau lebih dikenal dengan sebutan mbok emban, kalau

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai pustaka, 1984), hlm. 234.

¹⁵ Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908 – 1918*, (Jakarta: Pustaka utama grafiti, 1989), hlm. 30.

¹⁶ Ong Hok Ham, *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 10.

¹⁷ Koentjaraningrat, *op. cit.* hlm. 100

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 100

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 105

²⁰ Clifford greetz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 55.

mungkin satu untuk setiap anak, untuk mengasuh anak-anak mereka hingga anak-anak itu mencapai usia sekolah. Dengan demikian suatu keluarga priyayi kaya yang berpangkat tinggi kadang-kadang memiliki tiga atau empat orang pengasuh anak seperti itu, yang pekerjaannya hanya mengurus dan menjaga anak majikannya yang masih kecil-kecil. Oleh karena pembantu dalam rumah tangga priyayi biasanya bekerja selama hidupnya, dan juga turut tinggal dalam keluarga tersebut, maka ia biasanya juga sudah merupakan bagian dari keluarga itu, maka ia biasanya juga sudah merupakan bagian dari keluarga. Terutama para mbok emban seringkali menjadi dekat hubungannya dengan anak-anak yang diasuhnya. Apabila anak sudah mulai bisa berbicara, ia di ajar untuk berlaku hormat terhadap orang ayahnya.

Seorang anak kecil lebih jarang dihukum atau dimarahi oleh ayahnya daripada oleh ibunya, tetapi biasanya ia lebih hormat terhadap ayahnya. Pamong praja desa sering kali meniru gaya hidup para pegawai pangreh praja di kota, dan menghendaki juga bahwa anak-anak mereka berbicara dengan mereka dengan gaya bahasa krami yang sifatnya resmi, akan tetapi dengan ibunya, mereka biasanya tidak berbahasa krami.²¹ Dengan menggunakan bahasa krami tersebut sebanyak-banyaknya seorang anak tidak hanya lancar dalam hal menggunakan gaya bahasa itu tetapi sekaligus dididik dalam tata cara sopan santun jawa serta gerakan-gerakan jasmaniah yang erat sangkut pautnya dengan gaya bahasa tersebut. Anak-anak harus menghormati dan mematuhi (ngajeni) orang tua mereka. Ini berarti bahwa mereka berkewajiban untuk mengikuti petunjuk orang tuanya dengan patuh dan selanjutnya menyatakan penghormatan kepada mereka dengan bahasa yang sopan.²²

3. Pendidikan Kaum Priyayi

Tujuan didirikannya sekolah pada zaman kolonial adalah sebagai program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf. Implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda adalah untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik untuk birokrasinya namun dengan gaji yang murah. Karena apabila mendatangkan pekerja dari Eropa tentunya akan sangat mahal biayanya dengan gaji yang mahal dan harus memberikan akomodasi sarana dan prasarana. Pendidikan yang di buat pemerintah Belanda untuk kaum pribumi adalah untuk membentuk masyarakat feodal dan juga membentuk elite baru yang tunduk dan patuh terhadap pemerintah kolonial Belanda.²³ Sekolah pertama untuk anak pribumi didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan mendidik anak-anak aristokrasi di Jawa untuk menjadi pegawai perkebunan pemerintah yang senantiasa berkembang selama masa

tanam paksa.²⁴ Dari latar belakang tersebutlah kemudian dibuatlah sekolah dengan dua tingkatan yaitu sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan tuan tanah dan sekolah kelas 2 untuk pribumi kelas menengah dan biasa dengan mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah dan menggambar. Dengan adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh pihak kolonial, banyak priyayi tingkat atas yang memasukan anak-anaknya ke sekolah Belanda dan membiarkan tinggal bersama keluarga Belanda selama mereka sekolah. Hal ini bertujuan supaya anak-anak dari keluarga priyayi dapat menguasai keterampilan sosial dan kedinasan yang diperlukan sampai pada saatnya memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggi. Adanya pendidikan bagi kaum pribumi juga karena ditentukan oleh kebutuhan akan pegawai juru tulis yang meningkat.²⁵

Isi dari pengajaran pendidikan yang diciptakan oleh pemerintah Belanda hanya sebatas pengajaran pengetahuan yang dapat membantu Belanda mempertahankan kedudukannya di Indonesia. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda bertitik tolak pada pendidikan gaya Eropa dan hanya mengajarkan pendidikan secara umum sehingga mereka yang belajar mampu bekerja dalam struktur pemerintahan, dan bahasa Belanda pun menjadi wajib untuk setiap orang menguasainya.

C. KOMPARASI UNSUR KEPRIYAYIAN DALAM NOVEL TERALOGI PULAU BURU DENGAN FAKTA SEJARAH

1. Kehidupan Priyayi

Pada zaman pemerintahan Raffles bupati menjadi pejabat yang digaji dengan tanah atau dengan uang.²⁶ Para bupati memiliki latar belakang yang berbeda. Ada dari mereka yang merupakan keturunan sultan seperti para bupati dan keluarga Tjakraningrat di Madura, ada yang memang keturunan bupati sejak abad ke-18 atau permulaan abad ke-19, seperti di Cianjur dan ada yang benar-benar baru seperti di Ngawi, di mana kedudukan bupati sejak 1830 dipegang oleh orang dari luar.²⁷ Dalam salah satu edaran yang dikeluarkan pada tahun 1867 dijelaskan tentang tugas dan kewajiban para pamongpraja yang salah satunya adalah bupati. Para bupati berkewajiban untuk mengawasi penanaman wajib, meneliti perjanjian antara penanaman dan pengusaha eropa, mencegah semua pembatasan otonomi desa, mengawasi sekolah pribumi, membuat daftar guru-guru agama, dan seterusnya. Menurut adat, kedudukan bupati menganut sistem turun temurun.

Terdapat pembatasan tak resmi untuk jabatan birokrasi tinggi seperti bupati, dimana tidak saja

²¹ Koentjaraningrat, *op. cit.* hlm. 110

²² Niels Mulder, *Pribadi Dan Masyarakat Di Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm. 41.

²³ Moestoko Soemarsono, *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 47.

²⁴ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Bandung : Bumi Aksara, 2011), hlm. 29.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29

²⁶ G.H. Von Faber, *Oud Soerabaia*, (Surabaya: Outgeven door de gemeente Soerabaia, 1931), hlm. 38.

²⁷ Ong Hok Ham, *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 11.

mempertimbangkan kecakapan dan ijazah resmi melainkan juga harus dari kalangan berdarah biru. Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa bupati dipandang sebagai kepala atau pemimpin aristokrasi yang wajar dari rakyat, mereka masih mempunyai hubungan-hubungan wajar dengan rakyat. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam ordonansi pasal 69 bahwa bupati-bupati dipilih oleh gubernur jendral dari kalangan pribumi. Dan sejauh itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan adanya calon yang cakap, rajin, jujur dan setia, seorang putra atau kerabat dekat dari bupati yang terakhir, hendaknya yang dipilih. Pemerintah Belanda memerlukan para bupati ini sebagai sekutu militernya. Belanda dapat memerintah rakyat Indonesia dengan memeralat struktur dan budaya kepemimpinan tradisional. Kepatuhan rakyat setempat terhadap pemimpin tradisionalnya berarti ketaatan terhadap pemerintah kolonial.²⁸ Para bupati yang loyal tersebut diyakinkan bahwa kabupatennya itu akan tetap berada ditangan keluarganya, sekurang-kurangnya selama periode klasuk yaitu "tujuh turunan. Adanya hirarki mengenai jabatan bupati yang dijabat secara turun-temurun pada zaman kolonial juga tersirat dalam beberapa bagian cerita novel Tetralogi Bumi Manusia

"Ditimbang nenendamu jadi bupati, ditimbang dihormati semua orang, anak terpandai dalam keluarga, terpandai di seluruh kota. Ya tuhan, bakal apa jadinya anak ini."²⁹

"Sekali saudaraku datang menengok, terang - terangan menyatakan iba hatinya karena aku tak mau memilh jabatan pangreh praja."³⁰

Dari tahun 1860 dan sesudahnya pihak Belanda mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki struktur pemerintahan yang serampangan dan menciptakan suatu pemerintahan pribumi yang lebih teratur yang bisa mengimbangi pemerintah Belanda. Pada tahun 1867 hak Apenage bupati dicabut dan sebagai gantinya diberi gaji yang sering kali dikatakan kurang memadai. Kemudian pada tahun 1882 semua pejabat pribumi kehilangan hak mendapatkan pelayanan pribadi dari warga mereka.

Namun demikian di dalam lingkup kabupaten, para bupati tetap bisa hidup megah, walaupun tidak semegah pada saat VOC masih berkuasa di Hindia Belanda.³¹ Meskipun telah dihapus hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda namun tetap kesan kemegahan nampak terlihat dalam kehidupan priyayi. Ada sebuah hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para priyayi kelas tinggi khususnya bupati dan jajarannya yang disebut dengan Forum Privilegium. Forum Privilegium adalah

sebuah hak khusus yang dimiliki oleh priyayi kelas tinggi termasuk didalamnya adalah bupati dan keluarganya.³² Forum Privilegium merupakan hak yang sederajat dengan orang eropa di depan pengadilan untuk bangsawan pribumi sampai ke bawah bergelar Raden Mas atau setarafnya dan anak sampai cucu bupati. Mengenai adanya forum privilegium dalam Tetralogi Pulau Buru dapat ditemukan dalam seri Bumi Manusia sebagai berikut

"Tak bisa begitu," bantahku, "aku seorang Raden Mas, tak bisa diperlakukan asal saja begini," dan aku menunggu jawaban. Melihat ia tak tahu bagaimana mesti menjawab aku teruskan, "Aku punya Forum Privilegium"³³

Kemegahan yang lain dapat dilihat dari bagaimana mereka bisa menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda. Sistem pendidikan sekolah umum untuk anak-anak Belanda sudah dimulai di Batavia dalam tahun 1617, akan tetapi sekolah-sekolah umum untuk penduduk Jawa baru diadakan dalam tahun 1849.³⁴ Kaum priyayi-lah yang pada masa sebelum perang memperoleh keuntungan dari pendidikan yang disediakan Belanda untuk orang Jawa bahkan beberapa di antara mereka malah bersekolah di sekolah anak-anak Belanda dan bekerja sebagai pegawai serta administrator kecil di pabrik gula Belanda, perusahaan impor-ekspor dan industri transportasi. Anak-anak dari kaum priyayi dikirim oleh orang tuanya pada sekolah-sekolah Belanda untuk ilmu pengetahuan ataupun budaya-budaya Eropa. Alasan para priyayi menyekolahkan anak mereka disana agar bisa meneruskan jabatannya. Anak-anak keluarga priyayi yang berpangkat tinggi, seperti seorang anak patih atau bupati, di zaman sebelum perang dunia ke 2 pada umumnya dikirimkan ke sekolah lanjutan untuk anak-anak Belanda, yaitu Hogere Burger School (HBS), yang sama dengan sistem sekolah lanjutan di negeri Belanda, dan karena itu terbiasa untuk berbicara bahasa Belanda tidak hanya bila mereka berbicara dengan teman-teman sekolah mereka, tetapi juga dengan teman-teman Jawa mereka.³⁵

"Kalau sinyo pelajar H.B.S. tentu Sinyo putra bupati. Bupati mana itu, Nyo?"³⁶

"Kau mau jadi apa kalau sudah lulus H.B.S.?" tiba-tiba ia bertanya.

"Robert Suurhof bilang kau calon bupati."³⁷

Namun pendidikan tersebut hanya dapat dinikmati oleh anak laki-laki karena seperti yang telah di jelaskan sebelumnya dalam kajian mengenai budaya patriarki bahwa anak perempuan tidak bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak laki-laki.

²⁸ Hamka Hendra Noer, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 98.

²⁹ Pramoedya Anannda Toer, *Bumi Manusia*, (Jakarta: Hasta Mitra, 1981), hlm. 185.

³⁰ Pramoedya Ananta Toer, *Jejak Langkah*, (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), hlm. 68.

³¹ *Ibid.*, hlm. 61

³² Medan Prijaji, *Forum Privilegium*, 11 Juni, 1910, hlm. 28.

³³ Bumi Manusia., op. cit. hlm. 63

³⁴ Koentjaraningrat., op. cit. hlm. 76

³⁵ *Bumi Manusia.*, op. cit. hlm. 172.

³⁶ *Ibid.* hlm. 34.

³⁷ *Ibid.*, hlm 157

Hanya beberapa keluarga Jawa berpangkat tinggi yang bisa bersekolah seperti keluarga bupati, itupun hanya sampai sekolah rendah saja seperti R.A. Kartini, atau kalau tidak, bisa juga bupati memanggil guru Belanda untuk memberi pelajaran non tradisional secara pribadi kepada anak gadisnya.

Kecuali pendidikan yang bersifat tradisional, gadis-gadis Jawa juga diajari keterampilan maos, yaitu membaca buku-buku Jawa mengenai pendidikan budi pekerti yang ditulis dalam bentuk syair, dan di nyanyikan dengan lagu-lagu macapat. Anak-anak gadis keluarga priyayi yang tinggal di sekitar keraton, ada kalanya juga diajar tari serimpi.

Seperti yang telah di jelaskan di awal bahwa budaya patriarki adalah sebuah budaya manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Dalam budaya ini, kedudukan perempuan ditentukan lebih rendah daripada laki-laki. Di dalam masyarakat, terjadi dominasi laki-laki atas perempuan diberbagai bidang kehidupan.³⁸ Sistem patriarki merupakan halangan bagi wanita Jawa untuk mendapatkan status dan peranan yang setara dengan laki-laki. Sistem patriarki ini mengandung nilai-nilai yang mengutamakan laki-laki sehingga mempengaruhi cara wanita dan laki-laki mempersepsikan status dan perannya dalam keluarga dan masyarakat.³⁹

Dalam perkembangannya, Patriarki digunakan untuk menjelaskan kekuasaan laki-laki atas perempuan serta memiliki berbagai macam cara yang membuat perempuan tetap dikuasai.⁴⁰ Budaya patriarki berlaku ketika wanita masih menjadi seorang gadis yang berada dalam masa pingitan sampai pada waktunya sudah menikah, budaya patriarki tetap di jalankan sebagaimana mestinya. Wanita priyayi Jawa sebagai wanita dalam lapisan sosial yang menengah-atas, tidak hanya berposisi *subordinate*, tetapi juga diikat oleh banyak tatanan nilai kepriyayian khususnya yang berkenaan dengan wanita, yang berbeda dengan para wanita dalam lapisan sosial lainnya yang dalam hal ini adalah rakyat jelata.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, golongan priyayi Jawa cenderung berusaha lebih keras dalam disiplin diri untuk mampu menunjukkan sosok yang *alus* berdasarkan pada sejumlah nilai-nilai kepriyayian daripada golongan lain. Dalam hal kesopanan, kalau anak perempuan berjalan, maka ia harus melakukannya dengan perlahan-lahan. Dengan langkah pendek-pendek dan sopan, aduh perlahan-lahan sekali seperti siput. Kalau ia berjalan agak cepat, maka ia di caci-maki diibaratkan kuda berlari.⁴¹

“Rat, Surat!” panggil sastro kassier.
Gadis itu muncul, berjongkok menunduk di
hadapan ayahnya.⁴²

Ada hal unik dalam kehidupan priyayi Jawa di masalah yaitu walaupun terikat bersama oleh kebudayaan dan pekerjaan, kaum priyayi itu ternyata membeda-bedakan diri mereka sendiri berdasarkan, kelahiran, hubungan keluarga, pangkat, kemampuan, hubungan dengan orang-orang eropa dan penguasaan atas tanah. Sehingga gaya feodal ini begitu kental bagi mereka yang terbiasa hidup diatas masyarakat biasa atas hak-hak stratifikasinya dalam segala kehidupan sosialnya. Priyayi tinggi tentu akan tersinggung dirinya jika ada seorang yang meskipun sama-sama priyayinya namun karena jabatannya lebih rendah kemudian bersikap tidak sesuai dengan adat yang telah berlaku padanya. Orang yang lebih rendah mengambil pola *andap-asor* dan yang lebih tinggi mengambil pola yang lebih tinggi, kadang-kadang bahkan pola yang congkak, sekalipun hal itu dianggap tidak patut.⁴³ Hal ini juga berlaku bagi minke yang meskipun ia seorang priyayi namun karena yang di hadapinya adalah seorang priyayi yang lebih tinggi dari minke maka ia harus melakukan seperti adat yang telah ditentukan.

“Seorang opas membawa aku ke pendopo kabupaten. Dan, ya allah, aku juga di haruskan mrenagak-rangak menuju ke tempat di mana dia nanti duduk.⁴⁴

2. Wong Cilik

Sejak munculnya politik etis yang salah satunya menyelenggarakan pendidikan, terdapat pembukaan peluang-peluang mobilitas sosial bagi para *tiyang alit* di kota untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang didapat pada akhirnya akan mengantarkannya pada posisi dalam birokrasi pemerintahan. Tujuan pemerintah kolonial dalam membuka jenjang-jenjang pendidikan bagi kaum elit pribumi atau kaum priyayi adalah untuk memperoleh tenaga-tenaga terdidik dari para kaum elit pribumi untuk membantu menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi kolonial dalam usaha untuk memperluas dan melancarkan upaya penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Akses terhadap pendidikan kolonial meski tidak disandarkan pada kebangsawanan seseorang, namun sangat nyata terlihat bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses pendidikan tersebut, salah satunya adalah anak bangsawan.

Dalam arti tingkahlaku, pola *andap-asor* dari wong cilik pertama-tama terdiri atas segala macam tindakan menunduk karena orang Jawa mengartikan metafora fisik dengan sungguh-sungguh,

³⁸ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender edisi ke-2*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2004), hlm. 5.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 49

⁴⁰ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), 113

⁴¹ Sulastin Sutrisno, *Surat-Surat Kartini: Renungan Tentang dan Untuk Bangsaanya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985), hlm. 11.

⁴² Anak Semua Bangsa., *op. cit.* hlm. 198

⁴³ Koran Medan Prijaji, *Derajat Boemi Poetra*, 26 Februari, 1910, hlm. 89.

⁴⁴ Pramoedya Ananta Toer, *Jejak Langkah*, (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), hlm. 273.

mengasosiasikan ketinggian dengan kedudukan yang tinggi. Pada masa lalu para pelayan menyajikan makanan sebuah keluarga dengan berlutut dan penghormatan yang benar dari orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi adalah dengan berlutut serta menunjukkan isyarat menunduk (dua tapak tangan bersama dengan kedua ibu jari di depan hidung dan “anggukan horizontal” kepala) ke arah lutut orang yang lebih tinggi atau malah ke arah kakinya. Clifford greetz dalam bukunya *abangan, santri dan priyayi* menyatakan pernah melihat seorang pelayan tua yang datang mengunjungi nyonya besarnya dulu, isteri seorang priyayi tinggi. Hal ini sejalan dengan adegan dalam novel *Bumi Manusia*

“Dan pelayan itu tidak datang merangkak-rangkak seperti pada majikan pribumi. Malah dia melihat kepadaku seperti menyatakan keheranan. Tak mungkin yang demikian terjadi pada majikan pribumi: dia harus menunduk, menunduk terus. Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain.”⁴⁵

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: Tetralogi Pulau Buru karangan Pramoedya Ananta Toer merupakan novel yang secara tersirat ada kaitannya dengan sejarah mengenai kehidupan priyayi Jawa. Pembahasan mengenai priyayi Jawa ini menjadi hal yang penting mengingat sejarah besar berdirinya bangsa ini juga ada campur tangan dari kaum elite Jawa ini. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan hasil berupa kecocokan antara hipotesa-hipotesa mengenai priyayi Jawa yang diambil dari Novel Tetralogi Pulau Buru dengan fakta sejarah yang pada saat itu benar-benar berlaku. Sumber otentik yang digunakan adalah Koran Medan Prijaji yang diterbitkan pada kurun waktu 1910. Disana ada ditemukan kesamaan mengenai apa yang dibicarakan dalam novel Tetralogi Pulau Buru seperti adanya sekolah kepriayayan, adanya hak yang diperoleh oleh priyayi kelas tinggi dari pemerintah Kolonial Belanda, adanya sistem permagangan dan lain-lain. Selain itu ada juga hipotesa-hipotesa yang diambil kemudian dicocokkan dengan sumber buku-buku pendukung dan hasilnya ditemukan pula kecocokan yang sama. Contoh dari adanya kecocokan tersebut bisa dilihat pada perihal mengenai bagaimana hubungan antar priyayi, bagaimana peran seorang laki-laki dalam keluarga priyayi, bagaimana peran seorang perempuan dalam kehidupan priyayi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Badara, Dr. Aria, M.Hum. 2014. *Analisis Wacana : Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada*

Wacana Media. Jakarta: Kencana Prsenada Media Group.

- Bhasin, Kamla. 1996. *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Depdikbud. 1997. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur*. Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Faber, G.H. Von . 1931. *Oud Soerabaia*. Surabaya: Outgeven door de gemeente soerabaia.
- Greetz, Clifford. 2014. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, Depok: Komunitas Bambu.
- Greetz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press.
- Kartodirdjo, Sartono dan A. Sudewa. 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasdi, Aminuddin. 2011. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Koentjaraningrat. 1979. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 1999. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: PT. Tiata Kencana
- Kuntowijoyo. 2006. *Raja Priyayi Dan Kawula*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mansour Faqih. 2001. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulder, Niels. 1985. *Pribadi Dan Masyarakat Di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Ham, Ong Hok. 2004. *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong*. Jakarta: Kompas.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender edisi ke-2*. Yogyakarta: Indonesia Tera.
- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908 – 1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

⁴⁵ Bumi Manusia, op. cit. hlm 35

- Nasution, S. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung : Bumi Aksara.
- Noer, Hamka Hendra. 2014. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Partonadi, Soeratman Soediman. 2001. *Komunitas Sadrach dan Kontekstualnya: Suatu Ekspresi Kekristenan Jawa Pada Abad XIX*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- Partonadi, Soeratman soediman. 2001. *Komunitas Sadrach dan Kontekstualnya: Suatu Ekspresi Kekristenan Jawa Pada Abad XIX*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- Poesponegoro, Djoened Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegororo, Djoened Marwati dan Nugraha Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pramoedya Ananta Toer. 1988. *Rumah Kaca*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Pramoedya ananta toer. 2012. *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta:Lentera Dipantara.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. 1998. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robi Wibowo, *Nalar Jawa Nalar Jepang : Analisis Strukturalisme Levi Strauss Pada Mitos Jaka Tarub Dan Tanabata*. Yogyakarta: Gadjah mada university press.
- Sardjono, Maria. A. 1995. *Paham Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soemanto, Wasty, dkk. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soemarsono, Moestoko. 1985. *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soeratman, Darsiti. 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Sumbulah, Dr. Umi M. Ag, dkk. 2008. *Spektrum Gender : Killasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Sutherland,Heather. 1983. *Terbentuknya Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan
- Sutrisno, sulastin .1985. *Surat-Surat Kartini: Renungan Tentang dan Untuk Bangsaanya*. Jakarta: Penerbit Djembatan.
- Toer, Pramoedya Anannta. 1981. *Bumi Manusia*. Jakarta: Hasta Mitra
- Toer, Pramoedya Ananta. 1985. *Jejak Langkah*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer,Pramoedya Ananta. 1981.*Anak Semua Bangsa*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer,Pramoedya. 1985. Ananta Jejak Langkah. Jakarta: Hasta Mitra.
- Zainuddin Fannanie. 2000. *Restrukturalisasi Budaya Jawa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Koran

Medan Prijaji, *Siapa Makan Tjabe Dialah Jang Kepedesan*, 12 Maret, 1910.

Medan Prijaji, *Forum Privilegaitum*, 11 Juni, 1910, hlm. 28.

Koran Medan Prijaji, *Deradjat Boemi Poetra*, 26 Februari, 1910, hlm. 89.

Koran Medan Prijaji, *Hal Magang*, 18 Juni 1910, hlm. 284.